

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 01
TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI**

FITRIANI

Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk

Fitry@unismuhluwuk.ac.id

Hp: 081355413433

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan sudah dilaksanakan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. Penelitian ini dilaksanakan pada pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dari bulan juni hingga agustus 2017 dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian data laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Tahun 2015 dapat diambil kesimpulan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai secara umum sudah sesuai dengan PSAP 01, untuk Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai secara umum sudah sesuai dengan PSAP 01 kecuali paragraf 84 yang belum sesuai untuk komponen ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAP, dan untuk Komponen Laporan Keuangan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca serta catatan atas laporan keuangan, yang seharusnya memuat komponen Laporan Operasional dan Laporan perubahan ekuitas.

Kata Kunci : Penerapan PSAP, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berkembangnya reformasi di Indonesia saat ini telah membuka suatu wawasan baru mengenai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Dengan terpisahnya sistem pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran wilayah baru membuat sistematis pemerintahan juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pembuat keputusan dipemerintah.

Pemerintah mempunyai tujuan utama memberikan jasa dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu diperlukan akuntansi yang berbeda dengan akuntansi komersial pada umumnya, lembaga pemerintahan harus menyediakan sumber-sumber tertentu dengan sukarela dan memungut iuran dari masyarakat dalam bentuk pajak yang diurus secara efektif dan digunakan untuk pelayanan yang bermanfaat.

Untuk merealisasikannya, pemerintah pusat mengeluarkan dua peraturan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah keluarnya kedua undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan yaitu diantaranya adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan sekarang sudah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Pemerintah yang memberikan definisi terhadap akuntansi pemerintahan daerah sebagai proses pencatatan pengelolaan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umum bersifat keuangan termasuk pelaporan-pelaporan atas realisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 sebagai kelanjutan pemerintah untuk memperbaiki sistem keuangan pemerintah daerah agar :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Laporan keuangan pada dasarnya adalah laporan pertanggungjawaban pimpinan atau manajer perusahaan, karena laporan keuangan merupakan gambaran keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Penelitian ini akan diadakan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. Adapun masalah yang ditemukan penulis pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan belum dapat bisa dipahami oleh pembaca secara luas yaitu legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses investasi.
2. Selanjutnya masalah yang ditemui penulis adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, sarana dan prasarana yang sangat minim, akibatnya laporan yang dibuat cenderung apa adanya dan tidak efisien. Disamping itu masalah sumber daya manusia menjadi hal dominan yang perlu dibenahi, mengingat kompetensi para pelaksana keuangan daerah yang belum tersosialisasi secara luas tentang penyusunan APBD berbasis kinerja sebagai dasar dalam pelaksanaan penyusunan keuangan daerah yang lebih transparan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai”.

Tinjauan Pustaka

Konsep Akuntansi Pemerintah.

Akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga - lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD,LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Indra Bastian, 2005 : 15).

Pelaporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penggunaan istilah “laporan keuangan” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat memberi informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ini dapat berasal dari dalam (internal) maupun luar (ekternal) perusahaan. Menurut Belkaoui (2002 : 10).

Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Berikut adalah prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengungkapan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan anggaran akrual untuk pengungkapan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Nilai Historis (*historical cost*)

2. Realisasi (*realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

3. Substansi Mengungguli bentuk Formal .

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, ini bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkap dengan jelas dan dicatat atas laporan keuangan.

4. Periodisitas (*periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulan, semesteran juga dianjurkan.

5. Konsistensi (*consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode oleh suatu entitas pelapor (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa periode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode yang lama.

6. Pengungkapan Lengkap (*full disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

7. Penyajian Wajar (*Fair presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Tujuan Dari Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan APB statement No. 4 (AICPA) tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Sedangkan tujuan khususnya adalah memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan.

Secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang berguna dalam bantuan keputusan ekonomi sosial, politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban (*Accountability*) dan pengolahan (*Stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja managerial dan organisasi.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasi.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintahan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Apakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan sudah dilaksanakan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

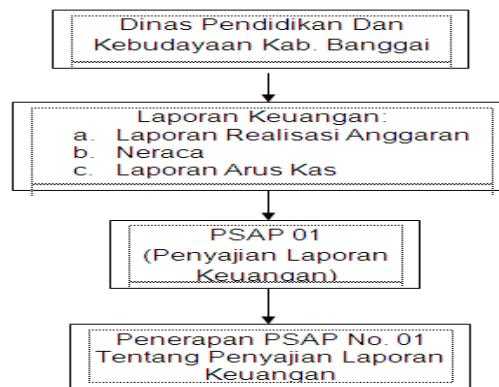
Berdasarkan rumusan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui apakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan sudah dilaksanakan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.

b. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat bagi peneliti yaitu penulis dapat mengetahui secara langsung penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.
- b. Manfaat bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan acuan dalam penerapan standar dalam penyusunan laporan keuangan.
- c. Manfaat bagi pihak ketiga sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

Hipotesis



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir diatas, sehingga hipotesis yang dapat dibuat adalah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan sudah dilaksanakan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.

METODE PENELITIAN

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau dan diyakini bisa membantu pelaksanaan penelitian, waktu penelitian selama tiga bulan, yaitu bulan Juni hingga Agustus 2017..

Populasi Dan Sampel

menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011:80). Populasinya yaitu Seluruh Pegawai yang ada di bagian keuangan.

Pengertian dari sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya (Sabar,2007). Sampel dalam penelitian ini yaitu sebagian pegawai yang berada di bagian keuangan.

Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data sebagai bahan informasi untuk dijadikan alat analisis, diantaranya sebagai berikut :

1. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau dinyatakan dengan bentuk angka sebagai data yang banyak dipergunakan dalam penelitian. Data ini dapat diperoleh dari laporan keuangan.
2. Data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Data kuantitatif diperoleh dari hasil wawancara dimana gambaran keadaan umum organisasi yang menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data antara lain yaitu data sekunder, data yang diperoleh dari pihak ketiga, yaitu dari kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur, bacaan-bacaan dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta sumber-sumber yang mendukung.

Definisi Operasionalisasi

Definisi operasional variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan dana atau aktivitas organisasi tersebut. Laporan Keuangan terdiri dari:

b. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai dalam satu periode laporan.

c. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.

d. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan adalah suatu bentuk penyusunan laporan keuangan, yang memberikan informasi gambaran umum tentang posisi keuangan dan kinerja pada suatu waktu periode akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan daerah juga digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai atas pengelolaan keuangan dan kinerja OPD dalam satu tahun anggaran.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. Komponen laporan keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai yang disusun dan disajikan terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015

Laporan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015 menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran meliputi belanja. Belanja diklasifikasikan menjadi Belanja operasi dan belanja modal. Laporan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai juga menyajikan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai pembandingan dengan tahun sekarang.

2) Neraca tahun 2015

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai tahun 2015 menyajikan pos-pos aset yang terbagi menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya, kemudian kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Selain kedua pos

tersebut, neraca Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai juga menyajikan ekuitas.

3) Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2015

Catatan atas laporan keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai tahun 2015 terdiri dari tujuh bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. Bab kedua memuat informasi tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja OPD.

Bab ketiga memuat informasi mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab keempat menyajikan informasi mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Bab lima berisi tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Bab enam menjelaskan tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan. Bab tujuh memuat uraian penutup catatan atas laporan keuangan.

Pembahasan

Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) memasuki babak baru dengan disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada basis kas, kini didasarkan pada basis akrual. Peraturan baru tentang Standar Akuntansi pemerintahan ini mulai efektif dilaksanakan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010.

Pelaksanaan perubahan peraturan tentunya tidak mudah, perlu adanya pemahaman dari peraturan baru sehingga pemerintah memberikan kelonggaran untuk melakukan transisi selama beberapa tahun kedepan dengan menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual. Evaluasi penyajian laporan keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai tahun 2015 menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai tahun 2015 belum sesuai dengan PSAP No 1 paragraf 25 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa laporan keuangan pokok SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Identifikasi beberapa komponen laporan keuangan juga telah memenuhi syarat sesuai dengan PSAP 01 ayat 26 yang mana pada setiap komponen laporan keuangan disajikan informasi mengenai nama entitas pelaporan, cakupan laporan keuangan, tanggal pelaporan, mata uang pelaporan, dan ketepatan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian Laporan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai tahun 2015 pada Pos belanja dalam laporan realisasi anggaran tahun 2015 diklasifikasikan menjadi belanja operasi dan belanja modal. Pengelompokan pos belanja menurut jenisnya telah mengacu pada PSAP 02 paragraf 18 yang mana dijelaskan bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Pos belanja operasi dalam laporan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai tahun 2015 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Penyajian pos belanja operasi telah mengacu pada PSAP 02 paragraf 36. Penyajian belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja aset tetap lainnya,. Penjabaran pos belanja modal telah sesuai dengan PSAP 02 paragraf 37. Selisih antara jumlah belanja selama satu periode pelaporan disajikan dalam pos surplus/defisit. Hal ini sesuai dengan PSAP 02 paragraf 49.

Neraca

Penyajian neraca diatur dalam PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan. Neraca Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai sesuai dengan PSAP 01 paragraf 44 karena telah menggambarkan posisi keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca juga sudah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 45 karena telah menyajikan sekurang-kurangnya pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana.

Aset Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai dikategorikan menjadi dua yaitu aset lancar dan aset tetap. Penyajian aset lancar yang meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, dan investasi jangka panjang telah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 49.

Aset non lancar yang tercantum dalam neraca Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai tahun 2015 meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Klasifikasi aset non lancar sudah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 51 yang menjelaskan bahwa aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen yang penyajiannya sudah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 52.

Aset tetap dalam neraca Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai tahun 2015 terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan, telah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 64 secara tepat. Komponen aset non lancar lainnya adalah aset lainnya yang penyajiannya telah mengacu pada PSAP 01 paragraf 66.

Menurut PSAP 01 paragraf 69 kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan atau satu tahun setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun. Penyajian pos kewajiban dalam neraca Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai tahun 2015 telah berpedoman pada PSAP 01 paragraf 75 sampai paragraf 78. Pos terakhir dalam neraca adalah ekuitas dana. Sesuai dengan PSAP 01 paragraf 84 dijelaskan komponen dari pos ekuitas dana adalah ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Komponen ekuitas dana pada laporan neraca Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai tahun 2015 belum sesuai dengan PSAP 01 paragraf 84 karena pos ekuitas dana hanya terdiri dari Ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Standar yang ditentukan pada PSAP 04 paragraf 17 menjelaskan bahwa Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai telah berpedoman pada PSAP 04 paragraf 17 dalam menyediakan informasi mengenai gambaran entitas secara umum.

PSAP 04 paragraf 20 menjelaskan bahwa untuk membantu pembaca laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut dicapai.

Penjelasan dalam PSAP 04 paragraf 24 yaitu catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan tentang pencapaian target kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai tahun 2015 menjelaskan mengenai perbandingan anggaran dan realisasi tahun 2014 dengan tahun 2015 serta ringkasan rencana dan realisasi anggaran untuk masing-masing program pada tahun 2014 dan 2015. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan juga dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. PSAP 04 paragraf 24 sepenuhnya telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai menguraikan tentang gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan. Uraian tentang perbandingan anggaran dan realisasi tahun 2014 dan 2015 juga telah dijelaskan. Namun, pada bagian ini belum dijelaskan mengenai strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan serta tidak diuraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga bagian ini belum sesuai dengan PSAP 04 paragraf 28 dan 29.

Komponen selanjutnya yang harus diuraikan pada catatan atas laporan keuangan yaitu mengenai kebijakan akuntansi. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai menyajikan kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan meliputi entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Penyajian ini telah sesuai dengan PSAP 04 paragraf 46.

PSAP 04 paragraf 58 menjelaskan bahwa entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya. Sesuai dengan penjelasan PSAP 04 paragraf 58, catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan mengenai pos-pos keuangan dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai juga menyajikan penjelasan atas informasi – informasi non keuangan

meliputi domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya, penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan,. Unsur penyajian tersebut sesuai dengan PSAP 04 paragraf 61 yang menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Tahun 2015 dapat diambil kesimpulan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai secara umum sudah sesuai dengan PSAP 01, untuk Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai secara umum sudah sesuai dengan PSAP 01 kecuali paragraf 84 yang belum sesuai untuk komponen ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAP, dan untuk Komponen Laporan Keuangan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca serta catatan atas laporan keuangan, yang seharusnya memuat komponen Laporan Operasional dan Laporan perubahan ekuitas.

Saran

Saran yang dapat diberikan bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, yaitu: untuk lebih mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memadai dalam pengelolaan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi, serta untuk penyusunan laporan keuangan selanjutnya diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai agar melengkapi komponen Laporan keuangan, seperti Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, indra, 2005, *Akuntansi Sektor Publik*, salemba empat, Jakarta

Belkaoui, ahmad riahi, 2002, *Teori Akuntansi*, erlangga, Jakarta

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*, penerbit fokus media

Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*

Peraturan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*

Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Republik indonesia, 2000, peraturan pemerintah no. 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*

Rutoto, Sabar. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian*. FKIP: Universitas Muria Kudus

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA,